

**STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI
WISATA PULAU PISANG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN
PESISIR BARAT PROPINSI LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Dakwah**

Oleh

MEDIA YURIDA

NPM: 1441020140

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2019 M

**STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI
WISATA PULAU PISANG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN
PESISIR BARAT PROPINSI LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Dakwah.



PEMBIMBING I : Dr. Jasmadi, M. Ag

PEMBIMBING II : H. Zamhariri, S.Ag., M. Sos. I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1439H/2019

ABSTRAK

STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA PULAU PISANG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT PROPINSI LAMPUNG

Oleh:

Media Yurida

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan perekonomian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sektor pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk uraian kata-kata. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data menggunakan dua sampel dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis maka sampel yang diambil berjumlah 9 orang. Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi sebagai metode utama, sedangkan metode interview dan dokumentasi adalah sebagai metode pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui program-program pengembangan sarana prasarana berupa listrik, jalan, home stay, dan pengembangan sumber daya manusia jasa pariwisata yang dijalankan dalam pelaksanaannya cukup baik dengan adanya upaya-upaya penyadaran, pengkapasitasan (capacity building) dan pendayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata mampu untuk meningkatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Masyarakat juga dibuat agar memiliki inisiatif dengan kemampuan sendiri secara praktis upaya yang dilakukan melalui pengarahan sumber daya untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian potensi-potensi yang ada dimiliki masyarakat tersebut dibuat agar dapat dijadikan nilai tambah untuk keluarga, dengan demikian masyarakat dengan lingkungan mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis.

Kata Kunci: Mengembangkan Sektor Pariwisata



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, Kode Pos 35131 Telp: (0721) 78088

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”** di tulis oleh :

Nama : Media Yurida
NPM : 1441020140
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka untuk itu pembimbing I dan II menyetujui untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jasmadi M. Ag.
NIP. 196106181990031003

Hi. Zamhariri. S. ag. M. sos. I
NIP. 197306012003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Hi. Zamhariri. S. Ag. M. Sos. I
NIP. 197306012003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, Kode Pos 35131 Telp: (0721) 78088

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA PULAU PISANG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT PROPINSI LAMPUNG”** yang ditulis oleh: Media Yurida, NPM : 1441020140, Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, pada hari rabu, 29 Mei 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. M. Mawardi J, M, Si

(.....)

Sekretaris : Fiqih Satria, S. Kom, M.T.I

(.....)


Penguji I : Faizal, S. Ag, M. Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Jasmadi, M.Ag

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi


Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP.196104091990031002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warohmatullhi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Media Yurida
Npm	: 1441020140
Jurusan/Prodi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA PULAU PISANG DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT PROPINSI LAMPUNG**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Juni 2019
Penulis,

Materai
Rp. 6000,-

Media Yurida
NPM. 1441020140

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ^ق

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S Ar-Ra'd 13:11)



PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta kasih dan rasa hormat yang tulus skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Ahmad Latief dan ibunda Rosida yang telah membesarkanku, mendidikku, menuntun setiap langkahku, dan senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesanku.
2. Ketiga adikku (Rizki Budiman, Alyana, Ja'far Siddiq) yang selalu memberi dukungan, dan doa serta bantuan selama ini.
3. Dosen pembimbingku bapak Dr. Jasmadi, M.Ag dan bapak H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, jurusan PMI, MD, BKI, KPI angkatan 2014 yang dalam persahabatan dan keresamaan berjuang dalam perjalanan kuliah ini, terus semangat dalam berkarya.
5. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Labuhan Pulau Pisang pada tanggal 10 juli 1996 Kabupaten Pesisir Barat, putri pertama dari pasangan suami-istri Bapak Ahmad Latief dan Ibu Rosida,

Pendidikan formal yang pernah ditempeuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 2 Batu Raja Tamat Tahun 2008
2. MTs Darussalam Tamat Tahun 2011
3. SMAN 1 Karya Penggawa Tamat Tahun 2014
4. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung Dengan Kosentrasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Isalam (PMI) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

Bandar lampung, Mei 2019

Penulis

Media Yurida

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya serta usaha yang penulis lakukan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini yang berjudul “*Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Pulau Pisang*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya, yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag sebagai wakil Dekan I sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberi pengarahan yang sangat konstruktif serta penuh kesabaran dalam membimbing penulis.

3. Bapak H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I sebagai ketua jurusan sekaligus pembimbing II, serta Bapak Dr. M. Mawardi, M.Ag., selaku sekretaris jurusan PMI Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
4. Tim penguji sidang munaqosah, Bapak Dr. H. M. Mawardi J, M. Si selaku ketua sidang, Bapak Fiqih Satria, S, Kom., M.T.I selaku sekretaris, Bapak Faizal, S. Ag., M.Ag selaku penguji I, Bapak Dr. Jasmadi, M. Ag selaku penguji II, yang telah memberi bimbingan dan penilaian skripsi ini sehingga penulis bisa lulus dalam sidang munaqosah.
5. Para Dosen Serta Staf Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi (FDIK), yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
6. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak angsung.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Penulis hanya bisa berdoa semoga amal ibadah Bapak/Ibu mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aminn. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Bandar lampung, Mei 2019

Penulis

Media Yurida



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	13

BAB II STRATEGI PEMBERDAYAAN PARIWISATA

A. Strategi Pemberdayaan

1. Strategi Pemberdayaan	18
2. Pengertian Pemberdayaan	20
3. Pemberdayaan Sebagai Proses	21
4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	22
5. Aktor Pemberdayaan Masyarakat.....	24
6. Tahap-Tahap Pemberdayaan	25
7. Metode Pemberdayaan	27
8. Tujuan Pemberdayaan	27
9. Peningkatan Kesadaran	28

B. Pariwisata

1. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Potensi Wisata	30
2. Prinsip Perencanaan Dan Sdm Pariwisata.....	31
3. Kebijakan Pemerintah Tentang Pariwisata	33
4. Jenis-Jenis Dan Objek Pariwisata	35
5. Daya Tarik Wisata.....	37
6. Dampak Pariwisata.....	37

7. Pariwisata Dalam Persepektip Islam	40
8. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pariwisata	45

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI PARIWISATA DI PULAU PISANG

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pesisir Barat	
1. Visi-Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	51
2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	52
3. Struktur Organisasi	54
4. Data Kepegawaian	54
B. Pulau Pisang	
1. Sejarah Singkat Pulau Pisang	56
2. Monografi Pulau Pisang	60
3. Wisata Budaya Dan Sejarah Pulau Pisang	61
4. Kondisi Sosial Agama Masyarakat Pulau Pisang	62
5. Kondisi Sosial Masyarakat Pulau Pisang	64
6. Kondisi Ekonomi Masyarakat Pulau Pisang	65
C. Upaya Pengembanagn Pariwisata	66
D. Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang	
1. Penyediaan Jasa Pariwisata Pulau Pisang	70
2. Penyediaan Sarana Pariwisata	72

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU PISANG

Strategi Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang	78
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kepegawaian Dinas Pariwisata	54
Tabel 2. Data Tempat Peribadahan Pulau Pisang	63
Tabel 3. Luas Panen Dan Produksi Pulau Pisang	65
Tabel 4. Jumlah Populasi Ternak Pulau Pisang	65
Tabel 5. Home Stay Atau Hotel Pulau Pisang	70



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Interview

Pedoman Dokumentasi dan observasi

Daftar Sampel

Surat Tentang Judul Skripsi Dan Pembimbing

Surat Izin Penelitian

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kartu Hadir Munaqosah

Foto Kegiatan Masyarakat Pulau Pisang

Dokumentasi Foto Dalam Penelitian

Surat ke aslian judul

Kartu konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami penulisan ini yang berjudul “*Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat*”. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan, sebagai berikut:

Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu strategi persuasif. Strategi ini merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan.¹ Strategi ini menekankan agen perubahan dalam dua hal, yaitu: menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan berupaya mencari jalan keluarnya; dan menggunakan bujukan melalui keterlibatan dan perasaan dan antisipasi terhadap faktor nonrasional yaitu pertimbangan budaya-budaya lokal.

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah dipimpin oleh seorang Kepala

¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2014), h. 372

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata.

Dalam penulis ini penulis mengikut sertakan kosa kata mengembangkan, kata mengembangkan diambil dari istilah asing yaitu *empowerment*. Secara konseptual pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* yakni kekuasaan atau pemberdayaan². Pemberdayaan adalah suatu proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi hidupnya. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat kelompok atau individu, memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiaannya.³

Potensi wisata atau potensi pariwisata adalah potensi dari berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin,

²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat*,(Bandung: PT Refika Aditama,2014), h. 57

³ *Ibid*, h. 58-59

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara, serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.⁴

Potensi pariwisata dalam penelitian ini lebih mengarah pada daya tarik dari sebuah objek wisata berupa fasilitas dan layanan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, pengusaha maupun Dinas Pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari penelitian tersebut adalah strategi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan berupaya mencari jalan keluarnya dalam mengembangkan objek wisata melalui sosialisasi berupa penyuluhan, dalam mengelola dan menyediakan fasilitas. langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan objek wisata yang ada di Pulau Pisang.

⁴ Sedarmayati, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industry Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2014), h. 55

B. Alasan Memilih Judul

Penulis tertarik melakukan penelitian wisata Pulau Pisang karena pantai ini sangat bagus, tetapi masih tertinggal dalam segi pembangunan. Dengan potensi yang dimiliki khususnya masyarakat Pulau Pisang perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata maupun masyarakat setempat dalam mengembangkan daya tarik wisata Pulau Pisang sangat diperlukan usaha yang maksimal dalam manajemen pengelolaan daya tarik maupun promosi secara local maupun global dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan jumlah pengunjung di pantai Pulau Pisang.

C. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan suatu sektor industri terpenting pada suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negara, masa era globalisasi ini dapat dilihat banyaknya penduduk di dunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi setiap negara. Perkembangan industri pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lahan kerja dan lapangan usaha, peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya.

Strategi pemerintah sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan kenyamanan pengunjung dan tersedianya jalur akses kelokasi dan sarana prasarana yang aman juga nyaman, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengembangan pariwisata harus diadakan promosi agar memiliki daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Harapan dalam pengembangan objek wisata tidak hanya melihat pada hasil jangka pendek saja, namun harus melihat bagaimana kelangsungan jangka panjang maka perlu adanya dukungan yang matang dari pemerintah dan masyarakat.

Pulau Pisang merupakan wilayah satu Kecamatan memiliki 6 (enam) Desa yaitu Pekon Labuhan, Pasar Pulau Pisang, Sukadana, Suka Marga, Pekon Lok, dan Bandar Dalam. Secara administrasi Pulau Pisang terletak pada Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Status tanah yang berada di Pulau Pisang sebagian bersertifikat dan sisanya berstatus kepemilikan adat/ulayat. Masyarakat Pulau Pisang usaha kesehariannya yakni nelayan dan ladang bagi para lelaki sedangkan wanitanya perajin kain sulam emas, dan kain tapis. Sarana dan prasarana yang ada di Pulau Pisang yakni: sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana air bersih dan sanitasi, transportasi, pendidikan.

Kecamatan Pulau Pisang sebagian besar adalah dipergunakan untuk lahan perkebunan sementara sisanya terbagi dalam peruntukan, seperti pemukiman penduduk dan fasilitas umum, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Gambaran

peruntukan ini sekaligus menunjukkan karakteristik wilayah Kecamatan Pulau Pisang bersifat agraris, Kecamatan Pulau Pisang didominasi oleh kegiatan perekonomian dalam perkebunan dan perikanan.

Pulau Pisang adalah salah pulau yang berada di Pesisir Barat Provinsi Lampung dan langsung menghadap Samudra Hindia. Pulau ini merupakan kecamatan tersendiri yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dengan seluas sekitar 12,64 Hektar yang dikelilingi dengan pasir putih yang halus dan bersih, pagar pantai pohon kelapa. Pulau ini juga memiliki beberapa spot wisata yakni pantai Dermaga yang terletak di Pekon Pasar, Gedung peninggalan Belanda terletak di Pekon Pasar, Lentigha Terletak Di Pekon Pasar, Batu Intan terletak di Pekon Pasar, Gua Liang terletak dipekon Bandar Dalam, Batu Tiga terletak di Pekon Sukamarga, Batu Bughi (Ghuri) terletak di Pekon Labuhan.

Bagi wisata yang suka berenang dikawasan Pulau Pisang maka di anjurkan di bagian Utara (ombak tidak besar), kawasan lain ombak besar karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, untuk menikmati lumba-lumba hanya dibulan-bulan tertentu yakni mei sampai juli, diving, snorkeling dengan kedalaman air 8-9 meter sedangkan terumbu karang dengan kedalama 3-8 meter, berselancar, memancing ikan marlin dan pemandangan habitat laut

Untuk mencapai Pulau Pisang perjalanan darat dari Bandar Lampung menuju Krui (Bandar Lampung menuju Pringsewu, lanjut ke Kota Agung, Sedayu, Bengkunt, hingga Krui). Perjalanan memakan waktu 6-7 jam. Setelah sampai di krui

untuk mencapai wisata Pulau Pisang memiliki dua jalur yakni dari Pelabuhan Tembakak memakan waktu 15-20 menit dan Dermaga Kuala Stabas memakan waktu 1 jam dengan menggunakan perahu. Pulau Pisang memiliki dua pelabuhan yakni Menawang Heni terletak di Pekon Pasar dan Pelabuhan Labuh terletak di Pekon Labuhan.

Pulau Pisang merupakan salah satu pulau yang tertinggal di provinsi Lampung. Pulau ini memiliki aliran listrik baru beberapa bulan. Hal ini juga menyebabkan keengganan investor industri pariwisata menanamkan modalnya di Pulau Pisang. Transportasi udara masih proses perbaikan sistem operasi, sementara transportasi laut yang berkembang hanya pelayanan lokal. Selain itu tempat penginapan yang memadai harus dikembangkan agar pengunjung merasa nyaman. Pengembangan sektor pariwisata dan lainya juga akan mempengaruhi terhadap sosial budaya yang harus diantisipasi.

Jadi diharapkan dilakukan pengembangan yang merata di setiap pariwisata. Pulau Pisang merupakan kepulauan kecil dengan segala keterbatasannya dan melihat keunggulan potensi yang dimiliki Pulau Pisang agar bisa dikelola dan dikembangkan dengan optimal. Jika potensi pariwisata ini berjalan dengan baik maka pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat yang nantinya bisa melakukan pembangunan dengan menggunakan PAD tersebut, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lapangan usaha dan lapangan kerja.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut adalah:

Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata
Dikecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah peneliti, maka tujuan peneliti adalah :

Untuk mengetahui Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek
wisata di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat?

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian.

Untuk memperoleh data-data, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.⁵ Dengan demikian data pada penelitian ini adalah mengenai stategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Objek Pariwisata di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁵ Irawan Soeharton, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 35

Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian.”⁶ populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau pengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas di pelajari sifat-sifatnya.

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah objek yang akan diteliti. Populasi juga merupakan kumpulan dari suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, sistem dan prosedur, fenomena dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 37 orang, masyarakat Pulau Pisang berjumlah 1.612 orang yang terdiri dari 6 pekon yakni: Pasar Pulau Pisang, Suka Marga, Bandar Dalam, Pekon Lok, Labuhan, Sukadana. Dengan luas wilayah 120,64 km².⁷

b. Sampel

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.⁸ Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non random sampling*, yakni tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.

Adapun kriteria sampel tersebut adalah:

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014), Cet.15, h. 173

⁷ Profil Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka Pesisir Barat In Figures Regency 2017, h. 29-49

⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. cit.*, h. 174

- a. Orang yang memahami program Dinas Pariwisata
- b. Orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan Dinas Pariwisata
- c. Masyarakat yang terlibat dalam mengembangkan wisata Pulau Pisang

Dari ciri-ciri tersebut dipeloreh 4 orang Dinas Pariwisata, yang terdiri dari: Hi. Audi marpi, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, Melia Irlistina, S. Kom selaku Ka. Sekanalisa pemasaran wisata, Aries Pratama, SS selaku Ka. Seksi promosi parawisata dan budaya, Yuni Rahmawati SS selaku Ka. Seksi objek dan daya tarik wisata.⁹ 5 anggota masyarakat Pulau Pisang yang terlibat dalam pemberdayaan. Jadi jumlah sampel berjumlah 9 orang.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Metode wawancara (interview)

Metode interview merupakan salah satu tehnik mengumpulkan data yang digunakan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape reconder).¹⁰

Menurut jenis interview dibedakan menjadi tiga macam yakni:

“interview terpimpin, interview tidak terpimpin, dan interview bebas

⁹ Data dari Dinas Pariwisata tentang Staf Dinas Pariwista.

¹⁰ Irawan Soeharton, *Op.Cit*, h. 67

terpimpin”. Jenis interview yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, dimana pelaksana wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan jawaban secara bebas, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Bentuk perencanaan perorangan maupun kelompok.

Dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data melalui interview untuk mendapatkan data tentang strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata, seperti partisipasi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pantai dan mengikut sertakan masyarakat disekitar pantai tersebut, baik dalam penyediaan jasa dan menjaga sarana-prasarana, promosi, keamanan, pelayanan. Interview diajukan kepada bapak Hi. Audi Marpi, MM selaku kepala Dinas Pariwisata, bapak Aries Pratama, SS selaku Ka Seksi Promosi Pariwisata Dan Budaya, Ibu Melia Irlistina, S.Kom selaku sekenalisa pemasaran wisata, dan Ibu Yuni Rahmawati SS selaku Ka. Seksi objek dan daya tarik wisata. Serta Ibu Hilda selaku masyarakat pulau pisang. Dan tujuh masyarakat lainnya yakni bapak Ujang, Pardi, Heky selaku pengelola perahu, ibu Komala selaku pemilik home stay, ibu Pet selaku pengelola home stay dan catering, ibu Au selaku pemilik warung bakso dan mie ayam yang sejak lama di percayai oleh masyarakat, dan ibu Mari selaku petugas kebersihan pantai.

b. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan mencatat segala sesuatu yang bisa dijadikan data atau bahan yang di analisis¹¹.

Kegiatan observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini antara lain untuk memperoleh data seperti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, baik dalam pengadaan dan menjaga sarana-prasarana yakni home stay dan tempat ibadah, promosi, keamanan, pelayanan, dan kondisi lingkungan di sekitar pantai, tempat wisata yang di promosikan yakni: pantai Dermaga yang terletak di Pekon Pasar, Gedung peninggalan Belanda terlatak di Pekon Pasar, Lentigha terletak di Pekon Pasar, Batu Intan terletak di Pekon Pasar, Gua Liang terletak dipekon Bandar Dalam, Batu Tiga terletak di Pekon Sukamarga, Batu Bughi (Ghuri) terletak di Pekon Labuhan

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi yang membahas masalah-masalah sebagai berikut: Sejarah terbentuknya wisata pantai pulau pisang, serta aspek-aspek yang terkait didalamnya yakni data

¹¹ Mathew Huberman, "*metode penelitian sosial*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, Suka, 1999), h 136

¹² Suharsimi arikunto, *Op. cit*, h. 131

penduduk atau monografi penduduk, tempat ibadah, home stay, warung makan.

4. Teknik Analisis data

Analisis data adalah mengubah data mentah menjadi data yang bermakna yang mengarah pada kesimpulan.¹³

Pada pelaksanaannya tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah proses pengumpulan data.

G. Tintauan Pustaka

Dengan penelitian ini sebelumnya dijelaskan ada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Khairunisa Afsari Nurfadillah, Universitas Lampung tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “*strategi pengembangan pariwisata pantai pangandaran (studi kasus di kabupaten pangandaran)*”. Dalam masalah dan tujuan yang di angkat adalah

1. Pengelolaan sampah yang masih buruk, terutama saat musim libur.

Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat membuat sampah banyak tercecer hampir disepanjang bibir pantai. Selain karena kurangnya kesadaran dari para wisatawan mengenai pentingnya kebersihan pantai,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Op. cit*, h. 53

juga karena ketersediaan tempat sampah disekitar pantai yang masih minim.

2. Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin menjamur dan belum tertata dengan baik, sehingga para pedagang kaki lima banyak memenuhi sepanjang area pantai Pangandaran, dan hal ini membuat wisatawan terganggu pasalnya pemandangan pantai yang dapat dilihat dari depan justru terhalang oleh banyaknya warung-warung.
3. Beberapa ruas jalan sekitar pantai yang sempit, sehingga rawan kemacetan. Sampai saat ini pemerintah daerah belum mampu mengurangi kemacetan yang kerap kali terjadi di Pantai Pangandaran terutama pada musim libur.
4. Banyaknya perahu-perahu nelayan yang terparkir sembarang disekitar bibir pantai juga mengganggu estetika pantai serta mengganggu aktivitas berenang wisatawan.

Tujuan penelitian dari saudara Khairunisa Afsari Nurfadillah adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran, serta untuk menjelaskan kemanfaatan pariwisata dengan gambaran strategi pengembangan pariwisata pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas.¹⁴

¹⁴ Skripsi Khairunisa Afsari Nurfadillah, Universitas Lampung “*strategi pengembangan pariwisata pantai pangandaran (studi kasus di kabupaten panagndaran)*” (skripsi: fakultas social dan ilmu politik, 2017), h.12-13

- b. M. Syaiful Dahlan, Universitas Lampung Tahun 2016 dalam skripsi nya yang berjudul *“Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pesisir Barat”*. Dia menjelaskan bahwa: Perkembangan industri pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lahan kerja dan lapangan usaha, peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya.

Dilihat dari penelitian terdahulu oleh Susan Dercelina tahun 2013 tentang Strategi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Dalam Pengembangan Objek wisata Di Kabupaten Lampung Selatan menyebutkan bahwa strategi Dinas Kebudayaan Dan Seni Budaya dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Lampung selatan adalah : (1) Meningkatkan usaha jasa Kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata. (2) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan non formal kepada pegawai. (3) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan, yaitu dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan Festival Krakatau yang diselenggarakan setiap tahun sebagai media promosi objek wisata bahari di Lampung selatan. (4) Meningkatkan

kerjasama dengan LSM dan komunitas sebagai mitra kerja dalam melestarikan, memelihara, dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Lampung Selatan. (5) meningkatkan kerjasama dengan media massa baik media cetak maupun media elektronik untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata (Susan Dercelina, 2013).

Pulau Pisang yang memiliki keunikan keindahan alam pantai dan bentuk pulaunya, daerah tempat mamalia laut seperti lumba-lumba, keindahan pantai, snorkling, berlancar, memancing ikan marlin dan pemandangan habitat laut lainnya seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun diketahui bahwa pengunjung Pulau Pisang tidak cukup optimal, di lihat dari sepiunya pengunjung yang datang ke Pulau Pisang. Berdasarkan data setatistik pengunjung pulau pisang tahun 2015 sekian, jika dibandingkan dengan pengunjung pulau rindu kamu di pesisir barat sekian pada tahun yang sama mencapai sekian. Hal ini dikarenakan daerah Pulau Pisang masih terbilang daerah terpencil dilihat dari daerah ini berbentuk pulau yang mana sarana dan prasarana yang tidak memadai, jarak tempuh yang jauh menggunakan perahu kecil dan tidak adanya listrik. Beberapa hal masalah yang telah dijabarkan menjadi menyebabkan berkurangnya minat 7 wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pisang. (sumber: Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015).

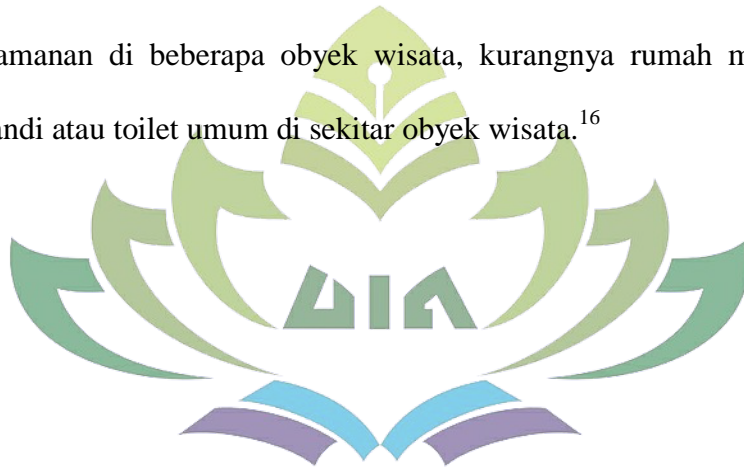
Terbatasnya ketersediaan energi listrik menjadi masalah yang harus bisa diselesaikan. Kondisi infrastruktur seperti ruas jalan menuju dan melalui Kota Krui cukup strategis namun kondisinya masih rendah kualitasnya. Hal ini juga menyebabkan keengganan investor industri pariwisata menanamkan modalnya di Pesisir Barat. Transportasi udara yang melayani kawasan juga terbatas, sementara transportasi laut yang berkembang hanya pelayanan lokal. Selain itu, belum adanya tempat penginapan yang memadai. Pengembangan sektor pariwisata dan lainnya juga akan memberi pengaruh terhadap sosial budaya yang harus diantisipasi.¹⁵

- c. Farida Robithoh Widyasti, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul: *“strategi promosi wisata pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga”*. Dia menjelaskan bahwa: Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung terjadi penurunan pada tahun 2007-2008 sebesar 12,8%, kemudian terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup pesat pada tahun 2008 2009 sebesar 56%, tahun 2009-2010 mengalami penurunan kembali sebesar 5,6% dan terjadi kenaikan kembali sebesar 13,9% pada tahun 2010-2011. Hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung

¹⁵ Skripsi M. Syaiful Dahlan, Universitas Lampung *“Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pesisir Barat”*. (skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tahun 2016). h, 1-7

belum merata pada keseluruhan obyek wisata yang ada. Hal tersebut dikarenakan belum dikenalnya obyek-obyek wisata lain di Temanggung.

Faktor lain yang menjadi persoalan adalah akses transportasi menuju obyek wisata masih kurang mendukung. Kurang mendukungnya akses transportasi ini disebabkan oleh kurangnya petunjuk jalan menuju obyek wisata. Faktor selanjutnya yang menjadi persoalan adalah kurangnya fasilitas pendukung yang dimiliki di obyek wisata. Misalnya, kurangnya penjaga keamanan di beberapa obyek wisata, kurangnya rumah makan dan kamar mandi atau toilet umum di sekitar obyek wisata.¹⁶



¹⁶ Skripsi Farida Robithoh Widyasti, Universitas Negeri Yogyakarta “*strategi promosi wisata pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga*”. (Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Tahun 2013), h, 4

BAB II

STRATEGI PEMBERDAYAAN PARIWISATA

A. STRATEGI PEMBERDAYAAN

1. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya yang tinggi, yang bebas dari kebutuhan dan potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemungkiman: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekatar-sekarat kultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Pelindunga: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apa lagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat.
- d. Penyokonga: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya: Pem-

berdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹

2. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).² Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat oranglain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut ife sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto (1995:61-64), pemberdayaan memuat pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- a. Pilihan-pilihan persoalan dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dengan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

¹ Oos Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. (Bandung: Alfabeta 2013), h.87-88

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). H. 57

- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.³

Pemberdayan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rendah dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Memjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

3. Pemberdayaan Sebagai Proses

Selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau perilaku manusia didalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan kebutuhan tersebut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan factor-faktor pendorong terjadinya perubahan, yang meliputi:

- a. Terjadinya persaingan-persaingan antara individu atau masyarakat yang senantiasa ingin memenuhi kebutuhan, dan hal ini hanya dapat dimenangkan melalui upaya-upaya perubahan dengan mengeksploitasi dan atau memodifikasi sumberdaya (fisik dan non fisik) yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di lingkungannya.

³ *Ibid.* h. 59

- b. Terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan fisik dan kelembagaan sebagai akibat persaingan antara individu atau antara masyarakat yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

4. Prinsip- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Mathews menyatakan bahwa: *“prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”*. Karena itu, prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnaagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, artinya, pemberdayaan akan efektif jika selalu jika mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawahan, artinya, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawahan, sejak dari setiap keluarga/kerabat.
3. Keragaman budaya, artinya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
4. Perubahan budaya, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya, pemberdayaan hanya kan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternative yang ingin diterapkan.
7. Belajar sambil bekerja.
8. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya, pemberdayaan harus dilakukan dengan

⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Edisi Revisi), h.64-65

9. penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai social-budaya) sasarannya.
10. Kepemimpinan, artinya, penyuluhan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasan sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
11. Kepuasan, artinya, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.⁵

Menurut beberapa penulis seperti Soloman (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift Dan Leven (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terhadap beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan social (Suharto, 1997:216-2170)

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja social dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai actor atau subjek yang komponen dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keragaman yang berasal dari factor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan social informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi sehingga kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadatan merupakan konci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, senergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.⁶

⁵ *Ibid*, h. 105-108

5. Aktor Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut :

- a. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:

- 1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
- 2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
- 3) Birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandiria.
- 4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan agar aparat dengan segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
- 5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
- 6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan

⁶ Edi Suharto, *Op.Cit.* h 68-68

masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti guru, dokter dan bidan.

- a. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri.
- b. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai local community organization. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, Pokdarwis atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok paketan dan sebagainya.⁷

6. Tahap-tahap pemberdayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini, *community worker* merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non directive (partisipatif).

- 1) Penyiapan petugas, ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi anggota tim agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.
- 2) Sedangkan dalam tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan study kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.

b. Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Proses assesment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasikan masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumberdaya yang dimiliki klien, dalam proses assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari

⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*, (Jakarta: Bappenas, 2000), h. 22-23

pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan

Pada tahap ini agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasipermasalahan yang ada. Hal ini biasanya dilakukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga agen perubahan sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program apa yang mereka prioritaskan terlebih dahulu.

e. Tahap Pelaksanaan (*Implementasi*) Program dan Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan, karena sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak adapenyandang dana yang mau meneruskan. Tahap terminasi ini aka nada bila agen perubah berasal dari luar komunitas atau orang luar (*outsider*).⁸

⁸ Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 251.

7. Metode Pemberdayaan

Pada perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa”

- a. PRA (Rapid Rural Appraisal)
- b. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau penilaian desa secara partisipatif
- c. FGD (*Focus Grup Discussion*) atau proses belajar dan mempraktikan secara partisipatif
- d. SL atau sekolah lapangan (*Farmers Field School*)
- e. Pelatihan partisipatif.⁹

8. Tujuan Pemberdayaan.

Menurut catatan Ite dalam bukunya Miftahul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.

1. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

2. Kekurangan beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntungan, sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntungan akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.¹⁰

⁹ Totok Mardikantok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 199

¹⁰ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 272-273

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa hakikat pemberdayaan adalah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

9. Peningkatan Kesadaran

Gagasan tentang peningkatan kesadaran merupakan bagian inti dalam pengembangan masyarakat dan merupakan bagian proses yang terpenting. Gagasan yang sederhana mengenai peningkatan kesadaran yaitu bahwa orang-orang menerima penindasan sebagai hal yang sangat normal atau tak bisa di hindari, disebabkan oleh legimitasi dari struktur dan wacana yang menindas, dan sekali lagi tidak akan mengakui atau menamai penindasan mereka sendiri, sehingga pengalaman penindasan bersifat di bawah sadar.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kesadaran untuk memberi peluang bagi orang-orang untuk menjalani situasi mereka dan struktur serta wacana yang menindas yang membangkai kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpbuat untuk menghasilkan perubahan.

Ada empat aspek dalam peningkatan kesadaran yakni:

- a. Pertama yaitu berkaitan dengan aspek personal dan politik. Peningkatan kesadaran mengharuskan bahwa keduanya dijalankan bersama-sama. Hal ini boleh jadi telah tercapai oleh para penulis feminis yang telah

melaksanakan bahwa pengalaman personal merupakan pengalaman politik dan bahwa pengalaman personal dan penindasan kaum perempuan harus dipahami dalam pengertian politik, yaitu struktur dan wacana kekuasaan dan penindasan patriarkhal yang berlaku di seluruh wilayah publik.

Dengan demikian, menolong masyarakat untuk membuat koneksi antara pengalaman personal dan politik merupakan bagian terpenting dalam peningkatan kesadaran, dan tentu seorang pekerja masyarakat dapat melakukan tugas ini dengan efektif bilamana dia memiliki kesadaran akan koneksi tersebut, dan memahami cara-cara struktur dan wacana yang dominan menyangkal koneksi tersebut serta membuatnya sulit bagi orang-orang untuk membuat link

b. Aspek kedua yakni Membangun hubungan dialogis.

Salah satu kritik terhadap peningkatan kesadaran yaitu bahwa ia dapat menjadi bentuk indoktrinasi ideologis semata oleh pekerja masyarakat, tempat pekerjaan tersebut memaksakan nilainya terhadap orang lain menggunakan bahasa pembebasan, tetapi kenyataannya dalam cara menindas dan menjajah yang bertentangan dengan gagasan praktik bottom-up.

c. Aspek ketiga yaitu berbagi pengalaman penindasan.

Cara ini yaitu dengan menyelidiki setiap pengalaman orang lain tentang apa pengertian dari penindasan, dan bagaimana orang-orang memahani dan mendefinisikannya, sehingga kesadaran kolektif dapat berkembang.

d. Aspek keempat yakni membuka peluang-peluang untuk tindakan.

Peningkatan kesadaran mungkin menghasilkan perubahan pada beberapa waktu mendatang, karena kondisi sosial, ekonomi dan politik terus berubah. Tetapi pada akhirnya, sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat, masyarakat sendirilah yang harus membuat keputusan tersebut, bukan pekerja masyarakat.¹¹

B. Pariwisata

1. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Pariwisata.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Taliziduhu Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan, di antaranya :

1. Pemberdayaan politik yang bertujuan meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. Daya tawar ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja yang tinggi dan berorientasi kepada: partisipasi dalam pengambilan keputusan, program pengembangan karir, gaya kepemimpinan, derajat tekanan yang dialami oleh karyawan dan budaya organisasi.
2. Pemberdayaan ekonomidiperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi

¹¹ Jim Ife, *Community Development*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2006), H. 345-350

sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus pemikul beban pembangunan, kegagalan program dan akibat kerusakan lingkungan.

3. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana ditengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktivitasnya.

4. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat.

5. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain merekadilatih untuk hidup tertib.

6. Pemberdayaan sosial budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment untuk menciptakan daya guna dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

7. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.¹²

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis wisata tersebut sangatlah penting untuk ditingkatkan oleh pemerintah agar melakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri.

2. Prinsip Perencanaan Dan SDM Pariwisata.

Menurut Yoeti (1997) pada dasarnya prinsip-prinsip perencanaan kepariwisataan dalam ruang lingkup local, regional, nasional dan rencana internasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Taliziduhu Ndruha, *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Direksi Cipta, 2003), h.132

- a. Perencanaan pengembangan kepariwisataan haruslah merupakan suatu kesatuan yang pembangunan regional atau nasional dari pembangua perekonomian.
- b. Menggunakan pendekatan terpadu.
- c. Keberadaan dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan.
- d. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan wisata harus didasarkan pada faktor administrasi saja.
- e. Memperhatikan faktor ekologi.
- f. Memperhatikan faktor sosial yang timbul.
- g. Perecanaan pariwisata didaerah yang dekat kawasan industri, perlu diperhatikan pengedaan fasilitas hiburan guna engantisipasi jam kerja buruh yang singkat dimasa datang.
- h. Pariwisata tersebut bagaimana bentuk da tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh kerena itu dalam pengembangan perlu memperhatikan kemungkinan peningkatan kerja sama dengan dengan Negara-negara lain dengan prinsip saling menguntungkan.¹³

Sumber daya manusia dibidang pariwisata dikelompokan menjadi:

- a. Sumber daya manusia berada dilembaga pemerintah: menghasilkan kebijakan/pembangunan pariwisata.
- b. Sumber daya manusia berada dilembaga pendidikan namun belum terlibat langsung usaha pariwisata, terdiri dari manajemen /karyawan, pendidikan, anak didik.
- c. Sumber daya manusia terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, pihak yang berperan menghasilkan produk dan/jasa wisatawan dalam kegiatan wisata formal, terdiri dari:
 1. Pengelola usaha pariwisata, meliputi pengusaha sektor formal usaha pariwisata yang mengelola berbagai usaha pariwisata.
 2. Pekerja/karyawanusaha pariwisata yang bernaung dibawah satu usaha pariwisata lembaga fomal.
- d. Masyarakat berada diluar sektor lembaga formal, namun terikat bisnis pariwisata.
 1. Berkaitan pariwisata sebagai industri, maka sumber daya manusia pariwisata adalah sumberdaya manusia yang terlibat dan menghasilkan kebutuhan wisatawan di usaha pariwisata meliputi: daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, penyelenggaraan : hiburan dan reaksi, pertemuan, perjalanan, konfesensi dan pameran, jasa: informasi wisata, konsultan pariwisata, paramuwisata, wisata tirta dan spa dan lain-lain.

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta:Graha Ilmu 2012), h. 58-59

2. Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam memajukan pariwisata.
3. Pentingnya sumberdaya manusia dibidang pariwisata merupakan sumber daya yang penting untuk mewujudkan keberhasilan kepariwisataan.
4. Pada industri pariwisata, perusahaan memiliki hubungan langsung dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan karyawan dan membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan konsumennya.
5. Pengalaman tamu/konsumen dalam industry pariwisata merupakan aktivitas yang memiliki intensitas tinggi dan tidak mudah ditiru/disediakan industry jasa-jasa lain.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata merupakan keunggulan sumber daya atau objek pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menciptakan kemakmuran rakyat. Potensi pariwisata pada dasarnya terletak pada sumber daya manusia pariwisata merupan aspek pendukung kegiatan wisata. Peran penting keberadaan sumber daya manusia di industry pariwisata, sebagai pencipta penggerak kelangsungan industry pelaku utama produk ini inti pariwisata dan factor penentu daya saing.

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Pariwisata

Dasar hukum pariwisata diatur dalam undang-undang republic indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Didalam undang-undang nomor 10 dijelaskan tentang ketentuan tentang pariwisata, asas, fungsi, tujuan pariwisata, prinsip penyelenggaraan pariwisata, pembangunan pariwisata, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, koordinasi, bahan promosi wisata Indonesia, badan promosi wisata daerah, gabungan industry pariwisata Indonesia, pelatihan sumber daya manu-

¹⁴ Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industry Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, (Bandung: Pt refita Aditama, 2014). h. 63-64

sia, tandardisi, sertifikasi, dan tenaga kerja, pendanaan,sanksi administra-
tive,ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

a. Asas pariwisata

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Manfaat.
- 2) Kekeluargaan.
- 3) Adil dan merata.
- 4) Keseinmbangan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Kelestariaan.
- 7) Partisifarif.
- 8) Berkelanjutan.
- 9) Demokrasi.
- 10) Kesetaraan.
- 11) Kesatuan.¹⁵

b. Fungsi pariwisata

Fungsi pariwisata yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan pariwisata.

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Menghapus kemiskinan.
- 4) Mengatasi pengangguran.
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- 6) Memajukan kebudayaan.
- 7) Mengangkat citra bangsa.

¹⁵ <file:///C:/UUTentangKepariwisataannet1.pdf.pdf>. Diakses pada 08 agustus 2018 jam 02:52

- 8) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.¹⁶

d. Prinsip penyelenggaraan pariwisata

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- 2) Menjunjung tinggi hak manusia, keragaman budaya, dan kearifan local.
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat.
- 6) Menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah.
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- 8) Memperkokoh keutuhan Negara Republik Indonesia.¹⁷

3. Jenis-Jenis Dan Obyek Pariwisata.

Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut Soekadijo yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut, antara lain:

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism).
Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam,

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*,

untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.

b. Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

d. Pariwisata untuk olahraga (sports tourism)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.

e. Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism)

Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.

f. Pariwisata untuk konvensi (convention tourism).

Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang convention tourism.¹⁸

Selanjutnya dilihat dari obyek wisata, maka Soekadijo menjelaskan bahwa obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan :

1. Obyek wisata dan daya tarik wisata alam. Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.
2. Obyek wisata dan daya tarik budaya. Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.
3. Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus. Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 22

¹⁹ *Ibid*, h. 23

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tujuannya, maka pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bentuk antara lain pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), pariwisata untuk rekreasi (recreation sites), pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism), pariwisata untuk olahraga (sports tourism), pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism), dan pariwisata untuk konvensi (convention tourism).

4. Daya Tarik Wisata

Suatu objek daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan berikut, yaitu *something to see* (ada yang terlihat), *something to do* (ada yang dikerjakan), dan *something to buy* (ada yang dibeli/souvenir). Objek atau daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Objek wisata alam: laut, pantai, gunung, danau, fauna, flora, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam.
2. Objek wisata budaya: upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara laut, upacara turun ke sawah, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, tekstil local, pertunjukan tradisional, adat istiadat local, museum dan lainnya.
3. Objek wisata buatan: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (laying-layang), hiburan (lawak, akrobatik), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.²⁰

5. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian

1. Dampak positif pariwisata.

Dampak positif pariwisata dalam perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penukaran mata uang asing.

²⁰ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 141

Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Pendapatan dari penukaran mata uang asing sangat besar nilainya dan berperan secara signifikan.

1. Menyejahterakan neraca perdagangan luar negeri.

Hal ini dapat mendorong suatu Negara dalam meningkatkan berbagai barang impor, untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakatnya

2. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata

Pengeluaran dari wisatawan asing secara tidak langsung akan menambah pendapatan daerah tersebut terutama dalam segi ekonominya.

3. Pendapatan pemerintah

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sector pariwisata dari berbagai cara. Beberapa Negara di dunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sector pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Negara maupun menaruh perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk berlibur kenegaranya.²¹

4. Penyerapan tenaga kerja.

Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung dibidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industri pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata: misalnya pertanian sayur-mayur, peternak daging, penyuplai bahan makanan, yang akan mendukung operasional industri perhotelan dan restoran.

5. Pembangunan infrastruktur

Berkembangnya sector pariwisata juga dapat mendorong pemerintah local untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan semuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

6. Peningkatan perekonomian masyarakat.

Pendapatan sector pariwisata acap kali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan local sangat sulit untuk diperhitungkan karena tidak semua

²¹ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta:c.v. Andi Offset,2009), h. 186

pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti, misalnya penghasilan para pekerja informal seperti spoor taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.²²

2. Dampak negatif pariwisata.

Hal ini dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kebocoran

Kebocoran atau leakage dalam pembangunan pariwisata di kategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu kebocoran impor dan kebocoran ekspor. Banyaknya kebocoran impor terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industry pariwisata, bahan makanan dan minuman impor yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat local atau dalam negeri. Khususnya pada Negara-negara berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus didatangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan akibatnya produk local dan masyarakat local sebagai produsennya tidak bisa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.

2. Kecolongan

Kecolongan atau enclave tourism sering disosialisasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan. Sebagai contoh, sebuah perjalanan pariwisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewati malam atau penginapan di hotel-hotel yang telah disediakan industry local. Sebagai akibatnya, kedatangan kapal pesiar tersebut dianggap sebagai rendah manfaatnya secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjungi.

3. Biaya infrastruktur

Tanpa disadari ternyata pembangunan sector pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sector pajak dalam arti untuk membangun infrastruktur tersebut, pendapatan sector pajak dapat ditingkatkan, artinya pemungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikan.

4. Inflasi

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya. Hal ini berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat local yang rendah sehingga menyebabkan mereka tergusur ke daerah pinggiran dengan harga yang masih terjangkau.

5. Ketertgantungan ekonomi.

²² I Gusti Bagus Rai Utama, *Op.Cit*, h. 13-15

Dibeberapa Negara khususnya Negara berkembang yang memiliki sumber daya yang terbatas, memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumber daya yang besar. Namun, pada Negara yang memiliki sumber daya yang beraneka ragam harus dapat juga mengembangkan sector lainnya secara profesional.²³

C. Pariwisata Dalam Persepektif Islam

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT., menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT. dan motivasi menunaikan hidup. Dalam konsep islam perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.²⁴

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi islam adalah bagaimana umatnya mengambil i'tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan sebagai di isyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Naml ayat 61

مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya “atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai dicelah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan) nya dan menjadikan suatu pemisah

²³ I Gusti Bagus Rai Utama, *Op.Cit*, h. 15-19

²⁴ Aisyah Oktarini, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.36

antara dua lauit? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan mereka tidak mengetahui” (QS. An-Naml/ 27:61)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa menerangkan bahwa Allah SWT., menciptakan bumi untuk tempat kita berpijak Allah SWT., juga menciptakan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan kehati-hatian. Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan terhadap tiga pokok; Tuhan, alam, dan manusia atau teologi, kosmologi, antropologi. Oleh karena itu, agama yang meliputi segala hal atau kaffah, memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup dunia modern yang tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok tadi, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia kepariwisataan termasuk sub sistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah, atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya.

Berwisata mengenal keagungan Allah SWT., berwisata melihat keagungan-Nya, berwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan dunia yang sebenarnya. Wisata juga ditujukan sebagai sebuah cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran; baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah orang lain. Pada gilirannya, siapa tahu nanti kita dapat hijrah; hijrah dari kejahilan menuju kearifan, hijrah dari kesombongan dan menjadi kerendahan hati, hijrah dari kesombongan menjadi kerendahan hati, hijrah dari kemaksiatan kepada kesalehan. Keindahan rasa dekat dengan Allah SWT. Sang Maha Segala-galanya

dan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan harapan setiap insan.²⁵

Dalam kajian islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu

a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan obyek wisata rohani.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya, manusia bisa mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, pengetahuan Sang Pencipta. Kemudian dia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam.²⁶

Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syari'ah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. Wisatawan muslim merupakan segmen baru yang sedang berkembang dengan pesat dalam industri pariwisata. Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka berupa pemenuhan makanan halal dan kemudahan pelaksanaan ibadahnya berupa sholat. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

²⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h.115.

²⁶ Humaidi Al Ayubi H, Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008, h.3

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pariwisata syariah merupakan seluruh kegiatan wisata yang tersebut, akan tetapi tanpa meninggalkan syaria Islam. Jadi secara umum pariwisata syariah dan pariwisata konvensional tidak beda, hanya kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman dalam memenuhi nilai-nilai Islam.

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.²⁷

Syakiy mengatakan konsep pariwisata syariah tidak terbatas pada wisata religi, tetapi meluas ke segala bentuk pariwisata kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pariwisata syariah adalah segala macam jenis pariwisata yang me-

²⁷ Aisyah Oktarini, Op, Cit, h.38.

nanamkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan dapat diperuntukan kepada siapa saja.²⁸

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, mengunjungi masjid-masjid peninggalan sejarah, haji, dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah dan semua yang disebutkan tersebut, melainkan pariwisata syariah adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

Sejalan dengan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Maka prinsip dalam pariwisata syariah harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagamaan dengan cara menghibur.

Dalam pengembangan pariwisata terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

- a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata atau lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap sesuai dengan syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.

²⁸ Syarifuddin, Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya, (On-Line), Program Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, h.31.

- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam surat al Al-Baqarah ayat 168

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan: karena hanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 168)

Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

- d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut Rosenberg pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.²⁹

D. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pariwisata

Istilah pemberdayaan disepadankan dengan kata bahasa inggris empowerment. Menurut Parsons (1994) yang dikutip oleh Suharto, menyatakan pemberdayaan adalah suatu proses dimana seseorang akan menjadi cukup kuat untuk berfartisipasi dan mampu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan tersebut lebih menekankan bahwa orang mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan

²⁹ Ibid, h. 33

yang cukup untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.³⁰

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rendah atau lemah sehingga mereka memiliki kemampuan kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mereka penuhi.³¹

Menurut, Ginandjar Kartasamita (1996) yang dikutip Harti, pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan guna mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi dan sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: Pertama, kemampuan masyarakat atau individu tersebut lebih berdaya. Kedua. Menekankan pada proses untuk memberi stimulasi, dorongan atau motivasi bagi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menekankan apa yang menjadi pilihannya.

³⁰ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pusat Pelajar)., h.81

³¹ Edi Suharto, *op.cit.* h.58-59

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan, guna memperkuat keberdayaan kelompok lemah yang terdapat di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengembangan masyarakat mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan sosial pada waktu tahun 1970-an menyusul bangkitnya kesadaran progresif dari sebuah komunitas internasional untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang yang lemah (disadvantage), menerima format pembangunan memenuhi kebutuhan dasar secara radikal dan mencari uang bagi munculnya partisipasi warga dalam proses pembangunan. Keterlibatan terhadap nasib orang-orang lemah dilakukan dengan cara mengubah kontrol sosial ke mode praktek yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program secara kolaboratif dan partisipatif. Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan mereka secara bersama-sama untuk mengontrol hidupnya sendiri.

Istilah pengembangan masyarakat yang semula dipandang sebagai kerja sosial yang mengandalkan peraktek dan bisa dilakukan oleh siapapun dengan cara diupah ataupun tidak di upah lambat laun menjadi sebuah pekerjaan profesional dan mengandalkan metode dan pendekatan ilmiah. Dengan demikian, pengembangan

masyarakat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi hidupnya. Dalam definisi tersebut terdapat dua pokok pemikiran penting dalam upaya memberdayakan masyarakat yakni: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).³²

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi dengan tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah atau negara. Disamping karena menyangkut manusia dan masyarakat, manusia dengan berbagai aspek yang merupakan objek studi sosiologi, analisis sosiologi terhadap pariwisata sangat penting dilakukan dengan mengingat berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Pariwisata telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai “industri terbesar akhir abad 20” (WTO, 2000) yang juga menyangkut “pergerakan barang, jasa, dan manusia dalam skala terbesar yang pernah dalam sejarah manusia”.
- b. Pariwisata bukanlah sebagai kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait dengan masalah sosial, politik,

³² Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), H. 14-15

keamanan, ketertiban, keramah-tamahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk berbagai industri sosial yang mengatur.

- c. Pariwisata bersifat dinamis, sehingga setiap saat memerlukan analisis atau kajian yang lebih tajam. Sebagai suatu aktifitas yang dinamis, pariwisata memerlukan, kajian terus menerus (termasuk dari aspek sosial budaya), yang juga harus dinamis, sehingga pembangunan pariwisata bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat lokal.
- d. Pariwisata selalu mempertemukan, dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, yang mempunyai perbedaan dalam norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan berbagai proses akulturasi dominasi, asimilasi, adopsi, adaptasi, dan seterusnya dalam kaitan hubungan antara budaya, yang tentu saja merupakan salah satu isu sentral dalam sosiologi.
- e. Dewasa ini pariwisata hampir menyentuh semua masyarakat dunia, sampai masyarakat terpencil pun kini sudah dirambah pariwisata dengan berbagai derajat pengaruh.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari pengertian pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata adalah suatu usaha masyarakat bahwa untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menjadikan pariwisata sebagai objek pengembangan diri maupun kelompok masyarakat guna mendapatkan hidup yang layak sebagai masyarakat yang mampu.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI PARIWISATA DI PULAU PISANG

A. Gambaran Umum Dinas pariwisata kabupaten pesisir barat.

Dinas pariwisata merupakan kepemimpinan pariwisata di Pesisir Barat.

Kepemimpinan Menurut Khomsahrial Romli dalam buku komunikasi organisasi lengkap, menyatakan bahwa “kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan.¹ Kemampuan seorang pemimpin merupakan suatu sarana untuk dicapai.

1. Visi-misi dinas pariwisata kabupaten pesisir barat

Visi Dinas Pariwisata Pesisir Barat selama dalam jangka waktu 2016-2021 adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat sebagai Kota Berbudaya dan Destinasi Wisata “. Berbudaya adalah kondisi kota yang mengutamakan kearifan budaya lokal diberbagai sektor. Destinasi Wisata adalah menjadi daerah wisata yang unggul dalam hal daya tarik.

Dalam rangka mencapai visi yang diinginkan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memiliki Misi sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah

¹ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap* (Jakarta: Grasindo, Edisi Revisi, 2014), h. 92

Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejahteraan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Pengembangan Produk Pariwisata

Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas produk pariwisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, amenities serta masyarakat.

c. Peningkatan Pemasaran Pariwisata

Misi ini mengandung makna peningkatan usaha pemasaran pariwisata yang meliputi analisa pasar, penetapan strategi, promosi dan kerjasama dengan pihak lain.

2. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur, tata kelola keuangan, administrasi dan monitoring evaluasi.
- b. Terpelihara pelestarian benda-benda sejarah dan peningkatan pengembangan seni budaya daerah.

- c. Peningkatan pengembangan usaha akomodasi, jasa pariwisata dan jasa pangan.
- d. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata meliputi objek dan daya tarik wisata, rekreasi dan wisata minat khusus dan hiburan umum.
- e. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui event promosi budaya pariwisata serta kerjasama penyelenggaraan wisata MICE.
- f. Tersedianya data, analisa pemasaran dan peningkatan pengembangan pemasaran promosi dan bina masyarakat sadar wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Pelayanan Administratif.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas yang di pertanggung jawabkan.

3. Struktur organisasi

Sebagaimana lembaga pemerintah pada umumnya, Dinas Pariwisata memiliki struktur pengurusan yang bergerak dalam menjalankan program yang ada di Dinas Pariwisata. Struktur yang tersusun adalah gambaran adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut, maka kepengurusan harus memiliki personalia yang memiliki dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan dalam organisasi atau lembaga.

4. Data kepegawaian

Berikut ini ada tabel daftar data kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir barat antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Urut Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

No	Nama	Pangkat golongan	Jabatan
1	Hi. Audi marpi, MM 19650803 198603 1 011	PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	Kepala Dinas
2	Herizan, SE, MM 19690704 199202 1 001	PEMBINA IV/a	Sekretaris
3	Hj. Emnayati, Spd, MM 19631024 198303 2 005	Pembina tk.i Iv/b	Kabit Pemasaran Pariwisata
4	Yulius Busyairi, S.Kom 196707701 198902 1 005	Penata tk. 1 Iii/d	Kabit Usaha Jasa Pariwisata
5	Unzir. S.p 19730115 199903 1 006	Pembina Iv/a	Kabit Destinasi Pariwisata
6	Mirton Setiawan, S.Pd. Mm	Penata tk.1	Kabit Sdm Pariwisata

	19850317 200902 1 001	Iii/d	
7	Melia Irlistina, S. Kom 19810817 200902 1 001	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Sekanalisa Pemasaran Wisata
8	Leo David. S. An 19830725 201403 1 002	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Sub Bag Keuangan
9	Aries Pratama, Ss 19850330 201403 1 002	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Seksi Promosi Parawisata Dan Budaya
10	Yuni Rahmawati Ss 19870630 201403 2 002	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Seksi Objek Dan Daya Tarik Wisata
11	Eko Y Ninggolan S.S 19870901 201403 1 002	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Seksi Akomodasi
12	Nita Perdana, S. An 19900602 201403 2 006	Penata muda tk.1 Iii/b	Ka. Sub Bag Umum Dan Kepegawaian
13	Immawan Saputra S. Pd 19830919 201001 1 012	Penata Iii/c	Plt.Ka. Sub Bag Perencanaan
14	Kiagus Amran 19630705 200212 1 007	Pengatur tk.1 ii/d	Staf
15	Erma Yuliza 19800721 201001 2 002	Pengatur ii/c	Staf
16	Aditya Yopie Diana, Amd. Par	Tenaga Kontrak	Staf Sekretariat
17	Fitri Wahyuni	Tenaga Kontrak	Staf Sekretariat
18	Meza Oktavia	Tenaga Kontrak	Staf Sekretariat
19	Rissa Ariana Putri S.Pd	Tenaga Kontrak	Staf Sekretariat
20	Reva Efriyanti	Tenaga Kontrak	Staf Sekretariat
21	Windi Rinzana	Tenaga Kontrak	Staf Pemasaran
22	Lisma Yulita	Tenaga Kontrak	Staf Pemasaran
23	Nazrul Hakim	Tenaga Kontrak	Staf Pemasaran
24	Ahmad Roma, S.St	Tenaga Kontrak	Staf Destinasi
25	R. Ardyansyah, S.Pd	Tenaga Kontrak	Staf Destinasi
26	Putri Eka Wulandari, S. Pd	Tenaga Kontrak	Staf Destinasi
27	Penilisa, S.Pd	Tenaga Kontrak	Staf Destinasi
28	Agus Styra Pratama	Tenaga Kontrak	Staf Usaha Jasa
29	Rama Doni Saputra	Tenaga Kontrak	Staf Usaha Jasa
30	Reva Contesa	Tenaga Kontrak	Staf Usaha Jasa
31	Gusti Imdarebi, S.Tr.Par	Tenaga Kontrak	Staf Sdm
32	Evi Rosita	Tenaga Kontrak	Staf Sdm
33	Muklis Rozi, Amd. Par	Tenaga Kontrak	Staf Sdm
34			
35			

36	4 orang kontrak lapangan		
37			
38			
39			

Sumber Data: Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Dicatat Pada Tanggal 16 Oktober November 2018²

B. Pulau Pisang

1. Sejarah Singkat Pulau Pisang “Pulau Cengkih yang Tersembunyi”

Tersembunyi di sisi barat Pulau Sumatera, Pulau Pisang kerap luput dari perhatian pembuat peta. Pasir yang putih bersih, aroma cengkih yang menyeruak, pulau kecil seluas 120,64 hektar ini seolah sepotong surga di tengah Samudera Hindia. Secara administratif, Pulau Pisang terletak di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Di dalam pulau ini terdapat enam pekon (desa) yakni Pekon Labuhan, Pekon Pasar, Sukadana, Sukamarga, Pekon Lok, dan Bandar Dalam.

Pada era tahun 70-80 an, Pulau Pisang merupakan sentra cengkih yang terkenal. Sayangnya, era kejayaan cengkih perlahan sirna, dan masyarakat pulau elok ini mulai kehilangan penopang ekonomi yang utama.

Sejumlah besar rumah-rumah penduduk telah ditinggalkan oleh pemiliknya, menjadikan beberapa desa di pulau ini seolah desa mati. Sebagian dari masyarakat yang tetap tinggal menggantungkan hidupnya dari mencari ikan atau nelayan.

² Wawancara, 09 September 2019

Meski demikian, pesona Pulau Pisang tidaklah hilang ditelan zaman. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom baru pada 2013, Pulau Pisang perlahan menampilkan dirinya sebagai destinasi wisata unggulan. Sebagai tempat tujuan wisata, tidak ada yang kurang dari pulau ini. Pantai yang bersih, bebatuan karang yang indah, dan habitat lumba-lumba di sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri.

Di Pulau Pisang terdapat berbagai obyek yang bisa dikunjungi, seperti Batu Gukhi yakni batu berbentuk unik di pantai. Kemudian, Batu Liang yakni tebing yang menjorok ke lautan yang menjadi obyek fotografi menarik.

Masyarakat Pulau Pisang juga memiliki kekayaan kuliner yang tidak ditemui di daerah lainnya seperti sayur dari daun kelor, sayur kacang hijau, dan lain sebagainya. Untuk mencapai Pulau Pisang diperlukan sekitar satu jam penyebrangan menggunakan perahu Jukung bermesin dari Pelabuhan Kuala Stabas di Krui, ibukota Kabupaten Pesisir Barat.

Jika anda beruntung, dalam perjalanan akan bertemu kawanan besar lumba-lumba yang berkejaran di sisi perahu. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan nelayan mencari ikan blue marlin.

Selain menyebrang melalui pelabuhan Kuala Stabas, juga bisa melalui jalur penyebrangan dari Desa Tebakak di Kecamatan Karya Penggawa dengan waktu tempuh yang lebih singkat, sekitar 15 menit.

Pulau Pisang memiliki sejarah peradaban yang kuat, adat istiadat marga Way Sindi Olok Pandan yang masih kental. Rumah-rumah tinggi berdinding kayu yang lazim disebut lamban balak masih dengan mudah ditemui di pulau ini.

Potensi ekosistem dan sumberdaya hayati yang ada di Pulau Pisang antara lain terumbu karang dan perikanan tangkap. dengan persentase penutupan karang keras hidup tidak begitu tinggi yaitu sekitar 34,46% yang termasuk dalam kategori sedang.

Hasil tangkapan yangberagam dapat terlihat seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan kerapu, dan ikan blue marlin. Perkebunan di Pulau Pisang didominasi oleh tanaman cengkih. Tanaman cengkih di pulau ini memiliki kualitas baik dan tidak berhama dengan jangka waktu panen setiap 1 satu tahun.

Selain itu ada beberapa tanaman lain yang tumbuh di pulau ini seperti kelapa, kakao (cokelat), singkong, tales, ubi, pisang, dan papaya. Hasil perkebunan biasanya dikonsumsi pribadi dan di jual ke daratan Sumatera.

Kondisi fisik perairan Pulau Pisang berpotensi sebagai kawasan wisata pantai, dengan beberapa kegiatan yaitu susur pantai, berjemur (*sunbathing*), dan memancing (*fisihing*).Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Pisang, tak usah khawatir mengenai penginapan. Karena di pulau ini telah tersedia sejumlah homestay, atau bisa pula berkemah di tepian pantai.³

³ Data dokumentasi Dari Dinas Pariwisata

Menurut pengakuan dari salah satu masyarakat pulau pisang sejarah dinamakan pulau pisang yakni:

“di desa Tanah Lapang memiliki kebun pisang manggala desa tersebut sekarang dikenal dengan desa Pasar Pulau Pisang, dan di didesa tersebut dahalnya memiliki sekolah Mts Pulau Pisang tapi sekarang sekolah di pindahkan ke Pekon Asahan Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa.”

“ suku pertama kali yang ada di Pualu Pisang yakni suku kepiri dan dahulu dikenal dengan Kampung Kepiri. Dengan berlajannya waktu maka desa tersebut berubah menjadi tanah lapang dan kemudian di ganti dengan Pasar Pulau Pisang.”

Suku Kepiri yang pernah tinggal di Pulau Pisang dengan berjalannya waktu pindah dan meninggalkan Pulau Pisang, dan tidak satu pun masyarakat yang tau suku tersubut sekarang menetap dimana”⁴

Dari penejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang peretama kali ke Pulau Pisang bukanlah suku lampung atau suku jawa melainkan suku kepiri.

Menurut sebagian masyarakat penyebab punahnya cengkeh di Pulau Pisang disebabkan oleh:

⁴ Wawancara, Rukiah, 25 Oktober 2019

“cengkeh Pesisir Barat di musnahkan dengan cara di semprot dari atas termasuk Pulau Pisang. Di ketahui masyarakat karena pada alas jerumaran cengkeh ada abu yang diduga dilakukan oleh orang-orang terpenting.

“Tapi sebagian masyarakat dengan adanya hal tersebut malah bersyukur karena masyarakatnya ada beberapa yang sombong dengan apa yang ia miliki”⁵

Dari pengekuatan masyarakat dapat diketahui bahwa penyemprotan dilakukan oleh orang-orang terpenting. Dan orang tersebut hanya berhenti sebatas dugaan-dugaan sementara. Dan dengan kejadian tersebut sebagian masyarakat malah bersyukur karena sebagian masyarakat lupa dengan adanya Tuhannya. Masyarakat berubah menjadi sombong dengan apa yang ia miliki di saat itu.

2. Monografi Pulau Pisang

a. letak geografis

Pulau ini bisa dicapai dengan perahu motor dalam waktu lebih kurang 45 menit, dari pelabuhan Kuala Stabas Barat. Pulau ini bisa dicapai dengan perahu motor dalam waktu lebih kurang 45 menit, dari pelabuhan Kuala Stabas atau sekitar 15 menit dari desa Tembakak. Tembakak adalah sebuah desa di Kecamatan Karya Penggawa yang merupakan daratan terdekat dengan pulau ini.

⁵ *ibid*

Pulau Pisang mempunyai luas wilayah sekitar 120,64 hektar, dengan merupakan daratan terdekat dengan pulau ini. Pulau Pisang mempunyai luas wilayah sekitar 120,64 hektar, dengan penduduk lebih kurang 1.612 jiwa/497 KK. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

b. Kondisi demografi

Secara demografi keadaan wilayah sepanjang Pesisir Barat termasuk Pulau Pisang. Umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3 % sampai dengan 5 %. Di bagian Timur Pulau Pisang terdiri dari 3 Pekon yang merupakan dataran tinggi dan berbukit.

Pulau Pisang merupakan pulau kecil yang sekarang merupakan Kecamatan Baru di Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah penduduk pulau pisang pada tahun 2016 adalah 1.612 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 876, perempuan 738, dan rasio jenis kelamin 118.

Berdasarkan potensi sumber daya manusia yang terdapat di pulau pisang dalam bidang pendidikan adalah tamatan TK 20 jiwa, SD 156 jiwa, SLTP 61 jiwa, SLTA 61 jiwa.

3. Wisata Kebudayaan Dan Sejarah.

- a. Menenun Tapis Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah menenun kain tapis. Tradisi Marga Way Sindi mengharuskan warganya menenun kain Tapis dan Benang Emas. Kain

tenun yang biasa bermotif gajah atau perahu ini juga bisa menjadi souvenir khas Pulau Pisang.

b. Atraksi Lumba-Lumba

Sebagai pulau yang belum begitu terjamah modernisasi, Pulau Pisang masih menyimpan pemandangan yang masih alami. Jika berangkat ke Pulau Pisang dari Pelabuhan Kuala Stabas pada saat musim ikan tongkol, seringkali wisatawan akan disambut dengan atraksi sekelompok lumba-lumba yang memangsa ikan-ikan tersebut. Untuk melihatnya, wisatawan harus berangkat pagi-pagi, antara pukul 07.00 sampai dengan 10.00 dengan diantar oleh nelayan yang sudah tahu k di mana lumba-lumba tersebut biasa muncul.⁶

c. Kondisi Sosial Agama Masyarakat Pulau Pisang

Pada umumnya masyarakat Pulau Pisang 100% menganut Agama Islam. Kehadiran agama dalam tataran kehidupan sosial masyarakat Pulau Pisang baik individu maupun kelompok sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tindakan dalam kehidupan seringkali melibatkan unsur keagamaan. Kehadiran agama telah memberikan sumbangsih tercepatnya interaksi yang membentuk budaya yang mempertahankan dalam masyarakat seperti selamatan kematian (selamatan ini

⁶<file:D:/SKRIPSI/Pariwisata/data%20pariwisata/buku%20panduan%20wisata.pdf> dari Dinas Pariwisata pada tanggal 23 oktober 2018 jam 11:00 am

untuk menyelamatkan orang yang telah meninggal), selamat pernikahan supaya saat acara pernikahan berjalan secara lancar.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Pulau Pisang memang mencerminkan masyarakat yang agamis. Hal ini tercermin dalam rangka kehidupan sehari-hari seperti dalam hari-hari Islam, misalnya Maulid Nabi, Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari Islam lainnya. Pada hari Maulid Nabi yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka biasanya merayakannya di masjid secara beramai-ramai. Mereka membawa makanan, berkumpul di masjid untuk mengadakan pengajian dan mendengarkan ceramah. Setelah itu makanan yang mereka bawa dimakan secara bersama-sama.

Kegiatan keagamaan yang sering terjadi lainnya misalnya pengajian yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan oleh anak-anak juga. Pengajian yang sering terjadi pada ibu-ibu yakni pada hari jum'at pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, yang dilaksanakan di masjid. Sedangkan pengajian untuk anak-anak dilakukan setiap hari kecuali hari minggu pada pukul 16.00- 17.00 WIB di TPA atau rumah warga.

Tabel 2

Data Tempat Peribadahan Masyarakat Pulau Pisang

No	Tempat beribadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musolla	-

3	TPA (rumah warga)	4
Jumlah		8

Sumber: wawancara dengan masyarakat Pulau Pisang.⁷

d. Kondisi Sosial Masyarakat Pulau Pisang

Manusia adalah manusia sosial, artinya manusia dimasyarakat tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong menolong dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong berdasarkan kesadaran, dan musyawarah masih terlihat di masyarakat pulau pisang masih sering terjadi. Kebiasaan seperti ini sering terjadi terutama pada saat acara-acar tertentu seperti acara pernikahan, khitanan, kematian dan syukuran. Kemudian nilai-nilai budaya yang ada seperti nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, masih dilakukan oleh masyarakat setempat contohnya: masyarakat memberikan langsung zakat fitrah ke orang yang kurang mampu pada saat menjelang Idul Fitri, beberapa masyarakat melaksanakan sholat magrib dan sholat jum'at berjamaah, dan setiap kegiatan hajatan selalu disertai dengan doa bersama.

Selain itu, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam, contohnya masyarakat menanam tanaman seperti sayur-sayuran, umbi-umbian yang dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan makanan dan diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat, contohnya membina kerukunan

⁷ Observasi dan wawancara, 09 september 2019

dengan cara bersilaturahmi dengan tetangga dan kerabat, musyawarah dan bekerja sama apabila terdapat masyarakat setempat sedang dalam mengalami musibah, gotong royong dalam acara tertentu seperti gotong-royong membuat panggung, tenda dan tempat masak atau lebih sering disebut dengan bahasa rewang.

Hubungan yang mereka wujudkan mencerminkan ciri kehidupan masyarakat desa pada umumnya. Kehidupan social yang terwujud dikalangan masyarakat sangat akrab, baik dalam hubungan kerabat, tetangga, maupun hubungan pertemanan.

e. Kondisi Ekonomi Masyarakat Pulau Pisang

Berdasarkan data kependudukan kabupaten pesisir barat pulau pisang berjumlah 1.612 jiwa, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan. Ada pun tanaman yang dilakukan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Luas Panen Dan Produksi Di Pulau Pisang Pada Tahun 2016

No	Tanaman	Luas (ha)	Produksi (ton)
1.	Jagung	42	172
2.	Ubi kayu	7	139
3.	Ubi jalar	5	48
4.	Kacang hijau	4	4
5.	Kacang tanah	2	2
6.	Cengkeh	138,0	
7.	Kelapa dalam	207,0	

SUMBER/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat⁸

⁸ Ibid, h, 118-127

Sebagian masyarakat Pulau Pisang bekerja sebagai peternak. Sedangkan untuk jumlah kepemilikan ternak hewan oleh penduduk Pulau Pisang adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Populasi Ternak Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Sapi	104 ekor
2.	Kambing	108 ekor
3.	Ayam buras	1068 ekor
4.	Bebek/itik	81 ekor

Sumber/Source: Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Barat⁹

C. Upaya Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang

Dinas Pariwisata memiliki upaya yang sangat besar dalam mengembangkan wisata Pulau Pisang. Dengan dukungan yang baik Dinas Pariwisata masyarakat yang menguntungkan hidup dari wisata yang ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki penghasilan tambahan yang lebih. Perlu peran aktif dari setiap bagian yang ada di Dinas Pariwisata untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Penyuluhan Dinas Pariwisata dilaksanakan untuk menambah kesanggupan masyarakat dalam usahanya memperoleh hasil-hasil yang memenuhi keinginan mereka. Jadi penyuluhan Dinas Pariwisata bertujuan adalah perubahan perilaku masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan wisata Pulau Pisang.

⁹ Ibid, h. 134-138

Adapun upaya yang dilakukan Disnas Priwisata ada beberapa tahap dalam melaksanakan program Dinas Pariwisata yaitu antara lain:

1. Tahap penyadaran

Dalam tahap ini penyuluhan Pawisata mengadakan pertemuan di rumah warga atau UPTD Dinas Pariwisata Pulau Pisang, para peserta yang telah memutuskan untuk mengikuti program Dinas Pariwisata akan diberi penjelasan (pencerahan) yang lebih detail tentang pentingnya perubahan untuk kehidupan yang lebih baik terutama dalam meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan keinginan mendapatkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Karena sasaran peningkatan ekonomi disini adalah dari anak-anak hingga orang dewasa yang didasarkan mengenai perlunya perubahan untuk merubah keadaan mereka agar lebih baik dari sebelumnya khususnya kesejahteraan dalam ekonomi.¹⁰

Dalam tahap penyadaran yang dilakukan oleh petugas penyuluhan Dinas Pariwisata adalah dengan cara memberi pencerahan berupa teori dan praktek bagaimana cara mengembangkan potensi wisata yang menarik untuk di kunjungi masyarakat luar. Materi yang disampaikan adalah bagaimana cara mengolah wisata gingga menarik

¹⁰ Aries Pratama, Ka. Seksi Promosi Pariwisata Dan Budaya, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2018

untuk masyarakat asing dimulai dari keramahan masyarakat, kebersihan pantai, sehingga bangunan yang membuat pengunjung nyaman untuk berwisata di Pulau Pisang.

Pada tahap ini penyuluhan Pariwisata memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun diberdayakan dan proses pemberdayaan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka sendiri bukan dari luar. Jadi, pada intinya adalah penyadaran yang mereka diberdayakan untuk membangun kesadaran diri bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk membangun capacity self.

2. Tahap pengkapasitasan (capacity building)

Dalam tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem lain. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan keterampilan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan penelitian yang diadakan oleh petugas penyuluhan Pariwisata. Pada saat ini masyarakat diberi pelatihan keterampilan keterampilan untuk menunjang kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam penelitian ini Dinas Pariwisata memberikan saran kepada masyarakat bagaimana cara meningkatkan ekonomi dan ketertarikan masyarakat asing untuk berkunjung.

3. Tahap pendayaan (empowerment)

Dalam tahapan ini masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri,

Menurut Bapak Aries Pratama, jadual pertemuan Dinas Pariwisata atau UPTD dengan masyarakat satu bulan sekali dalam rangka masyarakat menyampaikan masukan baik berupa kuluhan atau kemajuan dalam menjalankan masukan yang telah mereka jalankan.¹¹

Adanya peningkatan setelah adanya campur tangan dari Dinas Pariwisata karena memberikan pelatihan, pencerahan kepada masyarakat untuk meningkatkan wisata. Salah satu dampak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kenyamanan pengunjung.

¹¹ *Ibid*

D. Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang

a. Penyediaan Jasa Pariwisata Pulau Pisang

a. Perahu (Penyebrang Pulau)

Perahu yang ada di Pulau Pisang lebih kurang 10 perahu yang dikelola langsung sama masyarakat Pulau Pisang. Perahu untuk masyarakat Pulau Pisang dan untuk pengunjung Pulau Pisang agar dapat menyebrang ke Pulau Pisang. Alat transportasi ini merupakan alat umata bahkan satu-satunya untuk masuk ke Pulau Pisang ini hanya menggunakan perahu yang sudah disediakan masyarakat.

“kalo mau ke Pulau Pisang tidak ada kendaraan lain mb selain menggunakan perahu ini”¹²

Pengunjung yang ingin mengunjungi ke Pulau Pisang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000 perorang jika melalui pelabuhan Tembakak ke pelabuhan Menawang Heni atau Pelabuhan Labuh. Dan jika melalui pelabuhan Kuala Stabas biasanya mengeluarkan biasa sebesar Rp. 25.000 per orang ke pelabuhan Menawang Heni, jika perahu yang bukan jalan seperti angkot jika di darat. Namun, jika disewa itu berkisar Rp. 500.000-1.000,000 tergantung seberapa banyak barang yang di angkut atau sesuai dengan kondisi cuaca disaat itu.

“kalo semacam taksi perahu itu itungannya perorangan mb, tapi gak ti tunggu. Walaupun gak ditunggu jangan takut gak bisa pulang karena

¹²Ujang, Wawancara, *Penglola Perahu*, 09 September 2018

sudah ada jam beropesarinya sendiri mb. Jika pagi hari dari jam 06-08 pagi, siang dari abis zuhur samping jam 02, dan sore dari habis asar sampai jam 06 sore. Dengan tarif yang telah ditentukan perorangan.”¹³

Dari paparan tersebut dapat tergambar bahwa memang benar sudah tersusun dengan rapih, agar jika ada beberapa pengunjung datang kita tidak merasa terlalu mahal karena harus menyewa perahu. Selain itu, jika penyunjung ramai yakni hari-hari tertentu minsalkan lebaran, tahun baru dan hari libur lainnya, pihak pengelola perahu kualahan dalam melayani penumpang karena dengan keterbatasan perahu yang dimiliki.

“pernah itu dulu mb, waktu awal tahun, lebaran idul fitri sampai kualaha melayani penumpang di sebabkan terlalu banyak yang ingin menggunakan jasa perahu untuk menyebrang dan keterbatasan perahu sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan jam beropersai lagi mb.”¹⁴

Banyaknya pengunjung yang ingin melihat bagaimana indahnya Pulau Pisang dan ke indahan dasar lautnya, terkadang membuat pemandu wisata kuwalahan. Banyakkan saja laut lepas seperti itu menyebabkan pemandu wisata harus pandai-pandai merayu penyunjung agar tidak memiliki penasaran yang tinggi.

b. Kendaraan

Agar memudahkan pengunjung untuk menikmati pantai Pulau Pisang atau mengelilinginya maka ada beberapa masyarakat yang menyediakan

¹³ Pardi, Wawancara, Pengelola Perahu, 09 September 2018

¹⁴ Heky, Wawancara, Anak Buah Perahu, 09 September 2018

jasa sewa sepeda motor dan sepeda. Dan hampir setiap rumah warga memilikinya. Sewaan tersebut dengan biaya Rp. 30.000 untuk sepeda dan Rp. 50.000 per hari untuk sepeda motor.

“disini ada sewa sepeda dan sepeda motor dik untuk memudahkan pengunjung menikmati liburannya. Tetapi ada juga pengunjung yang memilih untuk jalan kaki.”¹⁵

b. Penyediaan sarana pariwisata

a. Home Stay

Beberapa rumah warga yang dijadikan untuk hunian para pengunjung atau home stay, berawal dari rumah warga yang di tinggalkan pemiliknya. Dan adanya komitmen yang dibuat oleh masyarakat jika ada penjunjung ingin minep di Pulau Pisang maka rumah warga yang ada di Pulau Pisang harus dijadikan home stay. Tetapi ada beberapa pengunjung yang membuat tenda di sekitar pantai Pulau Pisang. Paparan tersebut dijelaskan oleh ibu Pet pemilik home stay batu gughi:

“disini ini ada beberapa rumah yang dijadikan home stay mb, lantai 2 dijadikan home stay daln lantai dasar atau lantai satu dijadikan tempat tinggal pemiliknya. Di lantai bawah ada beberapa yang dijadikan rumah makan penginap.”¹⁶

¹⁵ Hilda, Wawancara, Selaku Masyarakat Pulau Pisang, 09 September 2018

¹⁶ Pet, Wawancara, Pengelola Home Stay, 09 September 2018

Salah satu masyarakat menjadikan rumah tempat tinggal mereka untuk dijadikan home stay bagi para pengunjung yang ingin menginap di Pulau Pisang salah satunya ibu komala pemilik wisama komal.

“disini ini rumah warga yang harus dijadikan home stay, karena sudah dimusyawarahkan bersama dengan warga untuk kerja samanya.”¹⁷

Masyarakat Pulau Pisang benar-benar memanfaatkan peluang yang ada, masyarakat lain tidak hanya diam saja malinkan ikut berfikir dan ikut membuat ekonomi mereka meningkat. Bahkan kekurangan kamar pihak rumah bersedia tidur diruang tamu.

“pernah dulu harus tidur diruang tamu karena ada beberapa pengunjung yang tidak dapat kamar dan ini terjadi dihari-hari tertentu minsalnya lebaran dan lain sebagainya”.¹⁸

Keadaan seperti ini membuat pemberdayaan masyarakat di Pulau Pisang tersebut lebih berdaya, karena semakin banyak pengunjung yang datang untuj pemasukan yang masyarakat dapatkan.

Pemasukan yang mereka dapatkan setelah terkenalnya Pulau Pisang oleh para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika Pulau Pisang belum dikelan wisata asing.

¹⁷ Komala, Wawancara, Pengelola Home Stay, 09 September 2018

¹⁸ Komala, Wawancara, Pengelola Home Stay, 09 September 2018

Keadaan seperti ini membuat para masyarakat yang berada di sekitar Pulau Pisang merasa lebih diuntungkan sehingga mereka tidak lagi dihantui kesulitan mendapatkan lapangan financial seperti yang dikatakan oleh ibu Komala yang bekerja sebagai pemilik home stay.

“dulu masyarakat Pulau Pisang hidup pas-pasan, hidup dengan keterbatasan. Sekarang di hari-hari tertentu bisa memegang duit Rp 100.000 perharinya.”¹⁹

Benar-benar perubahan yang terlihat dirasakan oleh masyarakat Pulau Pisang mereka memberdayakan kehidupan mereka sendiri dengan memanfaatkan pariwisata di kampung mereka.

Di Pulau Pisang terdapat empat home stay yang diresmikan oleh Dinas Pariwisata dan ada beberapa yang tidak diketahui Dinas. Dengan kejadian tersebut maka Dinas Pariwisata membangun home stay yang insa allah lebaran idul fitri bisa ditempati dilengkapi dengan listrik.

Tabel 5
Home Stay Atau Hotel

No	Nama	Tempat
1	Batu mandi	Pasar
2	Mutiara	Labuh
3	Batu guri	Sukadana
4	Wisma komala	Kempering
Jumlah	4	4

Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat²⁰

¹⁹ Komala, Wawancara, Pengelola Home Stay, 09 September 2018

²⁰ Observasi Dan Wawancara, 09 September 2018

b. Catering (Rumah Makan Bagi Yang Minep)

Catering yang berada di Pulau Pisang ini di buat khusus untuk pengunjung yang ingin menginap di Pulau Pisang. Karena home stay tidak menanggung makannya, jadi makanan itu di luar home stay yang mereka sewa. Pengelola catering ini adalah ibu pemilik home stay dan tidak semua home stay memiliki catering.

“kalo saya mb, pengunjung dipersilakan memilih beli makana dimana, jika pengunjung ingin kita siapkan maka kita siapkan mb, dan jika pengunjung tidak mau maka kita kaih tau warung makan minsalkan seperti bakso atau mie ayam .”²¹

Dapat dilihat dari sisi ini sudah jelas bahwa masyarakat Pulau Pisang sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan bahkan mereka bersama-sama berusaha untuk berdaya bersama bukan untuk masing-masing. Dengan kata lain, masyarakat Pulau Pisang ini bisa berdaya ekonominya karena kekompakan mereka yang ingin mengubah nasib dan kualitas pulau ini agar bisa dikenal masyarakat lain.

Selain itu, harga catering yang mereka berikan pun berkisar antara Rp. 20.000- Rp. 50.000 per orang dan sekali makan. Karena harga itu tergantung dari menu pilihan pengunjung. Jika pengunjung ingin makan mie ayam dan bakso harga sekitar Rp. 5.000-Rp. 10.000 per mangkoknya.

²¹ Pet, Wawancara, Pengelola Home Stay, 09 September 2018

“harga catering berkisar antara Rp. 20.000- Rp. 50.000 sesuai dengan pesanan yang di pesan, dan harga mie ayam dan bakso Rp.5000-1000 permangkok. Yang harus diambiln pemilik catering ke pedagang-nya atau pengunjung yang nyamperin pedagang tersebut.”



BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU PISANG

Strategi Pengembangan Pariwisata Pulau Pisang

Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi, karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan dan purbakala yang berbeda-beda.

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

Pelaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat khususnya Pulau Pisang, Pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu :

1. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures) adalah: Hotel, Villa, Restoran.

Dalam hal ini terdapat home stay dan restoran yang di area Pulau Pisang dan sekitarnya.

2. Sarana Pelengkap Pariwisata (Suplementing Tourism Superstructures) adalah: wisata budaya dan wisata alam.

Kecamatan Pulau Pisang tentu memiliki wisata budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah dan wisata alam jika dilihat dari kondisi topografinya yaitu dataran pantai dan gedung peninggalan sejarah.

3. Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures) seperti kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Pengembangan pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain :

1. Perhubungan: jalan raya, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau pemandu wisata.
7. Pom bensin.
8. Dan lain-lain.

Prasarana diatas secara keseluruhan sudah dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat baik dari segi perhubungan, instalasi listrik dan air, sistem telekomunikasi, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan wisatawan, pom bensin, dan lain-lain. Akan tetapi prasarana tersebut tidak semuanya berada dekat disekitar obyek-obyek wisata Kabupaten Pesisir Barat. Dan tidak semua prasarana tersebut ada di kecamatan pulau pisang.

Pulau Pisang berupa arahan salah satu pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebagai berikut :

1. Wisata pulau pisang terdiri dari: pantai Dermaga yang terletak di Pekon Pasar, Gedung peninggalan Belanda terlatak di Pekon Pasar, Letigha Terletak Di Pekon Pasar, Batu Intan terletak di Pekon Pasar, Gua Liang terletak dipekon Bandar Dalam, Batu Tiga terletak di Pekon Sukamarga, Batu Bughi (Ghuri) terletak di Pekon Labuhan.
2. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa home stay atau hotel.
3. Memenuhi kebutuhan jaringan sarana dan prasarana pada kawasan wisata.

Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mendukung kelancaran pariwisata. Sarana dan prasarana pariwisata Pulau Pisang sudah cukup baik dan lengkap seperti perhubungan jalan, pantai air bersih, sistem telekomunikasi, pelayanan kesehatan maupun keamanan, serta tersedianya akomodasi perhotelan/penginapan/home stay, rumah makan/restoran.

Namun sarana dan prasarana pada objek wisata tidak semua disediakan oleh pemerintah, akan tetapi disediakan oleh pengelola obyek wisata itu sendiri (masyarakat Pulau Pisang). Misalnya masjid/musholla, serta perbaikan prasarana berupa akses jalan. Penyediaan sarana fasilitas standar tersebut tidak hanya semata-mata diperuntukan untuk menunjang kegiatan wisatawan, namun juga agar dipelihara dan diperbaiki oleh masyarakat yang tinggal dekat di Pulau Pisang tersebut.

4. Membentuk Kabupaten Pesisir Barat Tourism Information Centre (TIC), event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Berdasarkan teori dan uraian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Yoeti mengatakan dalam teorinya bahwa pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada, dalam hal ini meskipun di Kabupaten Pesisir Barat potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak akan tetapi obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat belum ada yang dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah atau Dinas Pariwisata.

Pengembangan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tidak berupa pembangunan secara fisik pada obyek wisata yang sudah ada, atau memperbaiki dan menata ulang seluruh tempat obyek wisata, dan atau seperti membangun sarana dan prasarana pariwisata. Meskipun sarana pariwisata di Pesisir Barat sudah sesuai dengan teori diatas yaitu berupa sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata, akantetapi dari keseluruhan sarana tersebut belum ada yang dikelola dan dikembangkan secara khusus oleh Dinas Pariwisata, begitupun dengan prasarana pariwisatanya. Pengembangan dan pengelolaan obyek wisata baik sarana atau prasarananya yang ada saat ini banyak

dikelola secara pribadi oleh masyarakat, dan hasil dari pendapatan obyek wisata tersebut belum ada yang ditarik retribusinya oleh pemerintah.

Dinas pariwisata saat ini memfokuskan pengembangan pariwisata dengan pelestarian kesenian daerah, penyediaan lahan obyek wisata, dan jasa industri pariwisata yang diharapkan dapat menunjang bagi pembangunan wisata Pulau Pisang. Hal tersebut bukan berarti potensi pariwisata yang ada terbengkalai, namun kendala dalam pengembangan ini adalah karena keterbatasan dana yang ada dan pembangunan di bidang pariwisata Pulau Pisang masih dilakukan secara bertahap. Pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau Dinas Pariwisata juga berupa membangun mental dan pola pikir masyarakat agar selalu melestarikan kebudayaan Lampung dan memberikan pemahaman bahwa Pulau Pisang merupakan kota wisata sehingga masyarakat atau pelaku usaha diharapkan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya serta memiliki kreatifitas yang tinggi dan kemampuan lain dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pengembangan pada jasa usaha pariwisata terus meningkat dan lebih baik lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1 Dalam pelaksanaan program yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata melalui sarana-pasarana seperti listrik, jalan, home stay dan pengembangan SDM jasa pariwisata sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pelatihan yang diadakan setiap bulannya oleh Dinas Pariwisata yang di hadiri oleh perwakilan masyarakat. Kemudian kegiatan pelatihan keterampilan Dinas Pariwisata memberikan materi/teori sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam kesehariannya. Tujuan dari program ini pun sudah berjalan dengan baik mengikutsertakan semua kalangan yang awalnya hanya sebagai masyarakat yang mempunyai penghasilan yang sedikit berubah menjadi masyarakat yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kehidupan anggota keluarga.
- 2 Faktor pelaksanaan program Dinas Pariwisata ini memberikan efek yang positif bagi masyarakat semua kalangan. Dengan program Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan berupa materi dan praktek bagi masyarakat binaan supaya mereka lebih tau bagaimana cara memberdayakan wisata dengan baik dan hasilnya pun juga sesuai dengan harapan masyarakat dan Dinas Pariwisata.

- 3 Perkembangan ekonomi melalui upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk warung dan home stay.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak yaitu:

1. Dilihat dari pelaksanaan program Dinas Pariwisata ini sebaiknya tim penyuluh pelatihan terkait dengan peningkatan wisata. Seharusnya pihak Dinas Pariwisata mengajarkan tips-tips membuat sovenir yang kiranya bisa membuat wisata semakin tertarik dengan nuansa kearifan lokal.
2. Pihak pemerintah khususnya Dinas Pariwisata melarang tegas kepada masyarakat Pulau Pisang untuk menjual lahan nya kepada orang asing dengan alasan apapun, karena dapat menyebabkan wilayah Pulau Pisang di kuasai orang asing sehingga masyarakat pribumi jadi buruh dalam negri sendiri.
3. Menghapus kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat dalam rangka berziarah dimakam keramat (orang tua terdahulu) yang di percayai sebagai pemyambung doa tatkala lagi kesusahan atau menginginkan sesuatu.
4. Di upayakan terdapat wisata kuliner khas Pesisir Barat terutama Pulau Pisang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012
- Aisyah Oktarini, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016
- Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdaya rakyat*, Bandung: PT Refika, 2014
- Humaidi Al Ayubi H, Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
- Irawan Soeharton, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- I Gade Pitana Dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009
- I Gusti Bagus Rai Utama, *pemasaran pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017
- Jim Ife Frank Tesoriere, *community development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Jakarta: Grasindo: Edisi Revisi
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.115.
- Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Mardi Yanto Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekosistem*, Jakarta: bappenas 2002
- Mather Huberman, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Uin Suka, 1999
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Edisi Revisi, 2014
- Oos Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15 Jakarta, Renika Cipta, 2014

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage*, Bandung: Angkasa, 2005

Syarifuddin, *Analisis Produk, Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, (Online), Progran Ekonomi Syariah, Uin Sunan Ampel. Surabaya, 2013

Taliziduhu Ndraha, *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Direksi Cipta, 2003

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Edisi Revisi

<file:///C:/UUTentangKepariwisataannet1.pdf.pdf>. Diakses pada 08 agustus 2018 jam 02:52 pm

<file:D:/SKRIPSI/Pariwisata/data%20pariwisata/buku%20panduan%20wisata.pdf> dari Dinas Pariwisata pada tanggal 23 oktober 2018 jam 11:00 am